

Gelombang Transformasi Sosial Politik Dalam Kajian Foucault dan Coleman (Kajian Sosiologis Pergolakan Partai Lokal dan Nasional di Pilkada Aceh)

Oleh: Masrizal, S.Sos.I., MA¹

Abstrak

Artikel ini mengurai tentang gelombang transformasi sosial politik di Pilkada Aceh yang diperankan oleh partai Politik Lokal dan nasional, dengan melihat pendekatan kajian Foucault “Relasi Kekuasaan” dan Coleman “Teori Pilihan rasional”. Intinya berbicara relasi kekuasaan dalam pandangan Foucault (1982) bahwa relasi kekuasaan tidak dipahami dalam suatu hubungan kepemilikan sebagai properti, perolehan, atau hak istimewa yang dapat digenggam oleh sekelompok kecil masyarakat dan yang dapat terancam punah. Tetapi Kekuasaan menurut Foucault mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan, yang mempunyai ruang lingkup strategis. Memahami kekuasaan bukan dengan mengajukan pertanyaan apa kekuasaan itu atau siapa yang memiliki kekuasaan atau dari mana kekuasaan itu bersumber, melainkan memahami kekuasaan mesti didekati dengan mengajukan pertanyaan bagaimana kekuasaan beroperasi atau dengan cara apa kekuasaan itu dioperasikan. Hal ini juga dijelaskan oleh Coleman (1990:13) tentang Teori Pilihan rasional yang sangat tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa “tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan itu) ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi)”. Maksudnya Coleman menjelaskan bahwa kehidupan orang tak selalu berperilaku rasional, dengan asumsinya bahwa ramalan teoritis yang ia buat adalah untuk melihat apakah aktor bertindak tepat menurut rasionalitas atau menyimpang dari cara-cara yang diamati (menyimpang dari rasionalitas). Melihat pada kajian ini jelas proses Pilkada yang berlangsung dewasa ini tidak didasari pada perilaku rasional tetapi sebaliknya. Metode library menjadi sebuah kajian analitikal dalam melihat transformasi sosial politik di Pilkada Aceh dengan kajian sosiologi politik

Keywords : *Transformasi sosial, Pilkada , relasi kekuasaan, pilihan rasional*

¹ Dosen Sosiologi FISIP Unsyiah, Mahasiswa Doktoral (S3) Sosiologi Universitas Gadjah Mada

Pendahuluan

Pesta demokrasi yang diselenggarakan tahun 2017 mendatang akan menghadirkan pertarungan yang cukup sengit diantara calon perseorangan dan calon partai-partai politik, baik itu partai politik lokal maupun partai politik nasional yang ikut meramaikan pemilihan kepala daerah (Pilkada), untuk memperebutkan salah satu kursi dipemerintahan, baik sebagai gubernur/wakil atau walikota/bupati dan wakilnya, berbagai upaya dilakukan oleh kandidat baik calon perseorangan maupun calon dari parpol-parpol tersebut, dan ini sangat menarik jika dilihat dalam kajian Sosiologi pendekatan Foucault tentang relasi kekuasaan dan Coleman dalam pendekatan teori pilihan rasional.

Pola yang sering berkembang saat pelaksanaan Pilkada, salahsatunya adalah

pergolakan politik uang merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk memuluskan impian tersebut. Politik uang merupakan pemberian uang atau barang supaya disaat pilkada seseorang menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu. Namun artikel ini tidak berbicara spesifik tentang politik Uang tetapi lebih kepada pergolakan politik yang diperankan oleh partai Politik Lokal dan partai politik nasional. Disamping itu yang mengherankan hampir semua masyarakat Aceh masih adanya politikal saling menjatuhkan diperankan oleh si calon pemimpin maupun tim suksesnya, baik itu di media Sosial (Facebook, WA, Twitter dll) maupun di warung-warung kopi atau ruang publik lainnya yang menjadi tempat berkumpulnya para tim sukses, misalnya saling menuding calon si A salah dan si B benar, harusnya politik yang baik tidak saling menjatuhkan tetapi saling

mendukung, kalau tidak percuma saja Politik Damai menjadi icon yang ditawarkan kepada masyarakat dalam mendukung jalannya pemilihan kepala daerah di masing-masing kabupaten/kota di Aceh.

Merubah pola perpolitikan seperti ini bukan perkara mudah, namun juga tidak sulit ketika masyarakat dan pendukung calon kepala daerah mengembalikannya kepada hukum khusus yang dimiliki Aceh yakni “Syariat Islam”. Dimana apa yang diperankan oleh masyarakat, elit harus berdasarkan kepada aturan yang sedang berlaku di daerah tersebut, sehingga inilah yang membedakan wilayah Aceh dengan diluarnya. Jika hal ini tidak dipraktikkan maka sama halnya kita mempertontonkan kepada publik di Luar Aceh bahwa Keistimewaan Aceh tak lebih hanya kepentingan dan simbolik euforia Kejayaan Aceh dimasa silam.

Perjalanan demokrasi memang perlu ditanamkan di dalam

diri masyarakat, karena hampir semua masyarakat dan elitnya sepakat bahwa pola demokrasi harus dipertahankan dalam menjalankan perpolitikan di Indonesia, tidak terkecuali Aceh, kekuatan ini harus terus dikembangkan, karena pola *Autoritarian* yang dikembangkan dimasa Orde baru hampir semua masyarakat mengklaim bahwa pola perpolitikan dimasa tersebut dinyatakan gagal dalam menjalankan pola ruang publik dalam berkreasi, jadi untuk itu perlu semangat positif yang diarahkan dalam menjawab tantangan pasca reformasi. Meskipun Aceh memiliki historis yang panjang terhadap konflik, tetapi tidak membuat semangat demokrasi harus pudar tetapi semangat tersebut terus dikembangkan untuk menuju yang lebih baik. Meskipun banyak pihak tidak sepakat Aceh bersatu dalam menjawab kesejahteraan (kemiskinan, pengangguran dll) tetapi bagaimana masyarakat dan

elitnya yang akan bertarung dalam Pilkada 2017 nanti mampu mewujudkan dan memberikan rasa kenyamanan kepada warganya dalam memberikan hak pilihnya dalam mencapai tujuan demokrasi, meskipun elit *Luar Aceh* terus berupaya agar proses demokrasi di Aceh tidak berjalan seperti yang diharapkan oleh penyelenggara negara (KIP, Bawaslu, Panwaslih, dll).

Meminjam icon Yogyakarta, rasanya menarik untuk diterapkan di Aceh, seperti “*Yogyakarta Berhati Nyaman*” ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan didasari pada Hati masing-masing warganya dalam menjalankan dan menjawab tantangan zaman yang semakin hari terus memiliki perubahan, ini membuktikan bahwa perpolitikan yang dijalankan harus didasari melalui keyakinan hati masing-masing masyarakat dan elitnya. Pola ini tidaklah sulit dikembangkan di Aceh karena Aceh menganut syariat

Islam dan beberapa icon daerah kabupaten/kota telah menerapkan visi dan misi tersebut, hanya saja perlu penguatan dari elitnya, masyarakat dan pihak swasta lainnya.

Realitas menunjukkan bahwa besarnya kepentingan elit luar Aceh terhadap jalannya pesta akbar di Aceh jelas sudah tercium sejak beberapa tahun lalu, misalnya, bentuk kontestasi yang telah dimainkan oleh Jakarta jelas sudah terbaca sejak digadang-gadangkan sosok tokoh Aceh Tarmizi Karim, Abdullah Puteh dan lain-lain yang mengeyam istana parlemen dan istana kementerian untuk menjadi calon Gubernur, tetapi hal tersebut tidak menjadi momok yang berarti bagi tokoh Aceh dari Partai Lokal untuk berkompetisi di Pilkada Aceh, Apalagi yang dijagokan dari partai lokal Aceh adalah orang nomor dua di Aceh periode sedang berjalan, dan juga ketua partai lokal yang memiliki kursi terbanyak di DPRA atau pemenang pemilu 2014

lalu di Aceh, Yakni Muzakkir Manaf (Partai Aceh) Irwandi Yusuf (Partai Nasional Aceh) dan dari jalur perseorangan Zaini Abdullah (gubernur), Zakaria Saman (petinggi PA) dan Abdullah Puteh (mantan Gubernur Aceh).

Uniknya hampir semua wakilnya dari partai Nasional. Ini membuktikan bahwa Aceh memang sudah menjalin hubungan baik dengan Pusat dalam menjalankan roda pembangunan. Sebut saja Tarmizi Karim yang menjadi wakilnya T. Machsalmina Ali, Kader Golkar (partai nasional), Muzakkir Manaf wakilnya, T.A, Khalid, Partai Gerindra (partai nasional), Irwandi Yusuf, wakilnya Nova Iriansyah, Partai Demokrat, (partai nasional), untuk jalur perorangan juga sebagian wakilnya kader dari partai politik nasional Zaini Abdullah, wakilnya Nasaruddin (kader golkar) namun memilih naik dari calon perorangan/independen, Abdullah Puteh, Wakilnya Sayed Mustafa,

Juga Kader Partai Politik Nasional dari PAN, kecuali Zakaria Saman, memilih wakilnya dari unsur peguruan tinggi, seorang akademisi yakni Teuku Alaidinsyah (dosen Teknik Unsyiah). Ini juga menjadi bukti tersendiri bagi politisi Indonesia bahwa Pilkada Aceh unik dan menarik untuk dikaji, dimana banyak orang berfikir Aceh sulit menyatu dengan aktor partai politik nasional tetapi kenyataannya itu berbalik dengan stigma mereka dari luar Aceh yang merasa Aceh tidak akan berdampngan dengan partai Nasional. Sehingga ini membuktikan Aceh ingin selalu menjaga keutuhan dalam menjaga NKRI.

Pilkada menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegara karena rakyat harus memilih kandidat dari partai atau kandidat perseorangan yang dapat benar-benar membawa aspirasi dan kepentingan dalam formulasi kebijakan pemerintahan nantinya. Sebagai sebuah mekanisme, Pilkada kemudian

diharapkan dilaksanakan secara bebas dan setara (*free and fair*), dimana sistem pemilu menjamin hak individu dan adanya sistem kontrol bagi manajemen pelaksanaan pilkada. Di dalam Pilkada, akan terjadi problem struktural maupun problem kultural yang kemudian membentuk perilaku politisi dan perilaku pemilih. Pertautan kedua perilaku inilah yang kemudian membentuk representasi politik yang lebih terkesan penyerahan mandat yang bersifat transaktif dan banyak dipengaruhi oleh uang. Politik transaktif di dalam Pemilu kemudian disebutkan sebagai korupsi Pemilu.

Liddle (1997: 238-240), Menyimpulkan bahwa *self image* orang Aceh sangat dipengaruhi oleh sejarahnya yang unik. Hal ini seperti sejarah lisannya yang diwariskan turun temurun, dengan berbagai bentuk memori menjadi cerita bersama daripada sejarah yang dikonstruksikan oleh para

sejarawan dari berbagai hasil laporan perjalanan orang asing dari berbagai bangsa dan agama. Hal ini pula yang mendasari pemikiran Otto Syamsuddin Ishaq (2013: 95-96) yang menjeaskan adanya revolusi Politik di Aceh yang dimulai sejak periode kesultanan, periode Kolonial dan periode republik. Periode kesultanan merupakan masa keemasan (*golden age*) sebuah zaman ideal bagi masyarakat Aceh, dimana penerapan hukum Islam dan kejayaan politik sekaligus kemakmuran terwujud, dimana gelombang transformasi politik dan aktor dipegang oleh ulama dan umara, karena mereka adalah perumus dan pemimpin. Periode kolonial lebih banyak arah pemikirannya dipengaruhi oleh warga asing, meskipun spirit ke-Islaman tetap mengental dalam jiwa warga Aceh, yang dalam kajian tertentu disebut dengan ideologi Jihad menyatu dengan kehidupan masyarakatnya.

Terakhir, gelombang transformasi politik Aceh bergeser kepada Republik, dimana saat itu terjadi perdebatan sengit antara masyarakat dan pemimpinnya, ada sebagian warga menginginkan Aceh tetap berada diluar republik, dengan tetap pada Ideologi Jihad mewujudkan Aceh sebagai daerah yang menganut Islam secara seutuhnya, tetapi pemikiran itu mulai memudar setelah Soekarno mampu meyakinkan Daud Beurueh dengan tetap menawarkan Aceh sebagai sebuah provinsi yang menganut syariat Islam sehingga gelombang Jihad mulai ditinggalkan oleh masyarakatnya dan beralih kepada percaya kepada Jakarta, dengan berbagai tawaran diberikan, tidak hanya konteks ideologi Islam tetapi juga menjadikan Aceh sebagai daerah keistimewaan.

Pergolakan Partai Politik Lokal dan Partai Politik Nasional di Pilkada Aceh dalam Kajian Sosiologi (Relasi Kuasa dan Pilihan Rasional)

Melihat realitas perjalanan gerakan partai politik lokal dan partai politik nasional di Aceh menarik kiranya di analisis dengan dua pendekatan teori sosiologi yakni pilihan teori relasi kekuasaan dalam kajian Foucault dan pilihan rasional dalam pendekatan Coleman.

Atmosfir perjalanan partai politik lokal (PA, PNA dan PDA) di Pilkada Aceh 2017-2022 menjadi isu yang menarik untuk dikaji dalam kajian Sosiologi Politik, karena ketiga Partai ini memiliki ideologi yang berbeda-beda dalam mewujudkan tujuan demokrasi. Misalnya PA (Partai Aceh) yang merupakan partai pemenang pemilu dan pemenang Pilkada ditahun 2012-2017 telah membuktikan kepada publik bahwa mereka berhasil mengambil simpatik

masyarakat, yang pada saat itu yang menjadi jagoannya adalah Zaini Abdullah- Muzakkir Manaf yang dalam kampanyenya disingkat dengan ZIKIR, yang dalam konotasi islamnya zikir adalah identik dengan kedekatan hamba dengan tuhan, Intinya begitu Tanggal 9 April 2012 yang silam warga mengingat calon kepala daerah tersebut, bergitulah paling tidak perumpamaannya dalam pandangan penulis. Namun dua partai lokal lainnya (PNA dan PDA) memilih bersatu dalam kancah demokrasi, hal ini dibuktikan dengan dukungan yang diberikan terhadap calon Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah yang didukung oleh 2 partai Lokal dan tiga partai politik nasional.

Bicara tentang Pilkada Aceh, terasa manis tatkala kita memulai dengan melihat gerakan politik yang ada ditubuh Partai Aceh, Partai yang menjadi penguasa di bumi serambi mekkah ini memiliki pendukung yang sangat

kuat, dan mengakar hingga ke pelosok gampong/desa, dan hampir sebagian rumah warga rela dinding rumahnya di cat dengan simbol partai Aceh, begitulah bentuk kebanggaan warga Aceh terhadap simbol partai yang berlambangkan bulan bintang tersebut. partai yang dikenal sebagai partai yang getol memperjuangkan UUPA, namun di Pilkada 2017-2022 partai ini harus siap berkompetisi sesama elitnya, karena partai yang dbesarkan oleh Alm. Hasan Tiro harus merelakan kadernya untuk bertarung sesamanya di Pilkada, meskipun 2 tokoh lainnya tidak menggunakan jasa Partai Aceh, tetapi 2 tokoh ini juga orang yang sangat berpengaruh di Partainya yakni Zaini Abdullah (Gubernur 2012-2017) dan Zakaria Saman (petinggi PA) yang keduanya memilih jalur independen/perseorangan dengan masing-masing wakilnya dari Unsur kader partai nasional dan Akedemisi kampus.

Tentunya banyak pendukung Partai Aceh bertanya-tanya mengapa harus pisah mereka? Ini semua yang mampu menjawab adalah warga dalam Partai Aceh, tetapi masyarakat diluar PA juga bisa mengamati dari luar, bahwa sedang ada ketidakharmonisan di antara mereka dalam memperjuangkan tujuan internal Partai, disamping juga adanya intervensi dari luar Partai Aceh yang menginginkan mereka terpisah sehingga dengan mudah akan diperankan oleh orang berada diluar.

Hal ini dapat dilihat pasca berjalan tiga tahun kepemimpinan mereka (Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf) telah terjadi keretakan yang berarti dari keduanya, sehingga dibuktikan dengan dipilkada 2017 masing-masing mereka mencalonkan diri sebagai Gubernur, ini bila dikaji lebih jauh bahwa kedua tokoh ini memiliki ambisi besar menjadi penguasa atau orang nomor satu di Aceh, namun kita belum

mengetahui secara pasti apa tujuan yang diharapkan oleh mereka berdua, tetapi yang terlihat secara kasat mata bahwa mereka tidak harmonis dan saling menjatuhkan, misalnya yang beredar dimedia sosial dan media cetak dan elektronik seperti ungkapan yang keluar dari mulut Muzakkir Manaf “ Dokter hewan dan dokter manusia gagal dalam membangun Aceh” pernyataan ini mendiskreditkan kepada Calon yang di usungkan oleh Partai Nasional Aceh, Irwandi Yusuf sebagai dokter Hewan, berlatar pendidikan kedokteran hewan dan Dokter Manusia identik dengan Zaini Abdullah yang berlatarbelakang pendidikan dokter, yang pada periode ini (2017-2022) mencalonkan diri sebagai gubernur Aceh dari calon perorangan.

Sebenarnya pernyataan seperti itu tidak perlu keluar, kemudian ini akan menjadi senjata atau alat bagi lawan politiknya untuk mengembalikan kepadanya bahwa

calon yang di usung oleh partai penguasa ini tidak etis dan rusak secara individunya, sehingga menjadi bumerang bagi dirinya dan pemilihnya. Hal ini tak terlepas dari adanya ketakutan besar dari luar tatkala Partai ini terus berkuasa maka benih-benih yang dulunya ingin memisahkan diri dengan NKRI semakin kuat dengan kekuasaan yang dimiliki, untuk itu setingan terhadap riak ingin memisahkan para tokohnya terus berlangsung hingga menuju tahun 2017.

Bila halnya semua kader PA sadar akan mereka sedang dipengaruhi oleh luar mereka mungkin hal ini tidak akan terjadi seperti sekarang, kalaulah mereka kembali melihat kebelakang sangat jauh berbeda semangat kader dan simpatisan pendukung PA, karena yang mecalonkan diri di Pilkada Aceh 2012-2017 lahir dari kader PA sendiri, baik itu sebagai gubernur maupun wakilnya, dimana hampir semua ruang publik (lapangan)

penuh, dan bahkan kedatangan warga masyarakat kelapangan saat pilkada lebih kepada kemauan sendiri/keikhklasan untuk menghadiri kampanye. Tetapi hal ini berbeda di periode pilkada 2017-2022, dimana kedatangan warga masyarakat diruang publik (lokasi kampanye) pada saat deklarasi terus berkurang, apalagi yang mendampingi petinggi Partai Aceh dari partai Nasional (partai Gerindra).

Realitas desain politik Aceh yang diperankan oleh eksekutif dan legislatif telah membawa perubahan yang signifikan dalam konstelasi politik di Aceh, khususnya pasca Mou Partai Aceh mendominasi kursi dewan perwakilan rakyat Aceh (DPRA) dan DPRK, Partai Aceh tidak saja mengalahkan partai-partai lokal lainnya, tetapi juga sekaligus mengalahkan partai-partai nasional. Perubahan konstelasi politik di Aceh membawa implikasi yang penting, khususnya bagi masa depan

perdamaian di Aceh. Selanjutnya kemenangan lainnya tidak hanya di sektor jatah kursi di parlemen tetapi juga kursi eksekutif (gubernur/wakil gubernur, Bupati/walikota) sejak masa kepemimpinan Irwandi- Nazar (2009-2012) hingga Zaini Abdullah- Muzakkir Manaf (2012-2017).

Selain itu juga Partai yang dikomandoi oleh Muzakkir Manaf, yang sekarang menjabat Wakil Gubernur Aceh, dan sedang persiapan untuk ikut kompetisi melalui Partai Aceh sebagai calon gubernur 2017-2022, dengan didampingi T. A. Khalid dari partai Nasional (ketua DPD Gerindra Aceh). Menariknya partai lokal yang berkuasa ini menggandeng wakilnya melalui partai nasional, ini adalah satu prestasi, dan menarik untuk dikaji, jikalau kembali pada butir MoU jelas Parlok yang telah dibentuk harus menjalin hubungan baik ke nasional melalui perwakilannya di daerah apakah itu

di partai politik maupun institusi negara lainnya (TNI/Polri dll)

Aksi Partai Nasional dalam Pilkada Aceh cukup menarik untuk disimak, hampir semua calon gubernur Aceh berdampingan dengan partai nasional, dan bahkan juga calon perorangan yang mencalonkan diri pernah mendaftar kepada partai nasional untuk diusung sebagai cagub atau cawagub, saat Parnas membuka ruang kepada calon yang akan di usung di pilkada Aceh 2017-2022.

Gerakan Partai Nasional dalam mendukung calon kepala daerah di Pilkada Aceh dapat dijelaskan sebagai berikut: *pertama*, Pasangan Irwandi Yusuf- Nova Iriansyah didukung oleh Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan dua Partai Lokal yakni Partai Nasional Aceh (PNA) dan Partai Damai Aceh (PDA). Kedua Pasangan Muzakkir Manaf- T.A. Khalid, di dukung oleh Partai Gerindra, Partai

Keadilah Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang, dan partai lokalnya Partai Aceh (PA). Ketiga Tarmizi Karim- T. Machsalmina Ali didukung oleh Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan PKPI, dengan tanpa ada dukungan dari partai Lokal Aceh. Begitu juga untuk tiga tokoh Aceh lainnya yang naik dari jalur perorangan para wakilnya dari kader partai politik nasional.

Jika dianalisis secara politik sepertinya ada sebuah ketakutan dari petinggi Partai Lokal di Aceh (PA, PNA dan PDA). Misalnya partai lokal yang sedang berkuasa di Aceh (PA) disaat ada kadernya yang ingin berkompetisi sesamanya sehingga memilih jalan bergandeng dengan partai nasional, begitu juga PNA secara lokal yang mendapat suara nomor dua terbanyak di

parlemen (Partai Nasional Aceh) juga memilih calon dari partai nasional sebagai wakilnya. Ini membuktikan kepada publik bahwa Partai lokal di Aceh dalam Pilkada Aceh 2017-2022 belum sepenuhnya memiliki kekuatan penuh dalam meyakinkan pemilih. Ini halnya sangat berbeda dengan dua Pilkada Sebelumnya (2006-2012, 2012-2017) dimana aktor partai Lokal Aceh berani untuk berkompetisi dengan aktor/ kader partai politik nasional.

Sehingga ini menjadi penting ketika melihat relasi kuasa pengakuan terhadap perpolitikan yang diperankan oleh partai politik nasional, dimana jika kita melihat kebelakang pengakuan kekuatan partai lokal mengalahkan partai politik nasional. Ini juga yang menurut analisa penulis bahwa apa yang diharapkan oleh sistem perpolitikan nasional telah dicapai ketika mereka mampu masuk kedalam sistem lokal Aceh, yang dulunya sulit untuk ditembus. Bisa

saja pilihan ini menjadi sebuah pilihan yang rasional melihat situasi terkini di Aceh.

Kajian teori pilihan rasional Coleman (1990:13) dalam Ritzer (2010) tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa “tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan itu) ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi)”. Sehingga ini sangat jelas bahwa ketika tujuan politik dalam meraih kursi nomor satu Aceh maka dirasa perlu adanya penyatuan antara aktor lokal dan nasional sehingga ada kekuatan yang luar biasa yang dalam kajian Coleman disebut adanya peranan unsur “aktor” dan “sumberdaya”. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Coleman menjelaskan interaksi antara aktor dan sumber daya secara rinci menuju ke tingkat sistem sosial, bahwa basis minimal untuk sistem sosial adalah dua orang aktor, masing-masing mengendalikan

sumber daya yang menarik perhatian pihak lain. Dalam hal tersebut terjadi saling ketergantungan (saling membutuhkan), saling ketergantungan tersebut meliputi seluruh sistem sosial. Setiap individu bertujuan memaksimalkan perwujudan kepentingannya, ini memberi ciri saling tergantung atau ciri sistemik tindakan mereka.

Pola yang berkembang dalam upaya kampanye hampir sebagian besar arah cara perpolitikan dalam menggalang massa dibuat berbasis kepada pola Agama dan adat, dimana para kandidat melihat arah Fanatisme yang dimiliki rakyat Aceh dari waktu ke waktu sangat terkait dengan perjuangan agama dan adat. Disamping juga adanya hadih maja *Hukum ngon Adat lagee zat ngon sifent*. Hanya karena agamalah mereka mau berjuang mati-matian, kondisi seperti ini tergambarkan dalam beberapa kali perang baik melawan penjajah Belanda maupun rezim

Indonesia yang nasionalis-sekularis. Kemudian pola ini pula yang meyakinkan para pemuda Aceh diawal bergabung dengan gerakan Aceh merdeka (GAM) dalam mencari arah politik, sehingga tidak hanya dari kalangan laki-laki terpengaruh dengan gerakan ini tapi juga jenis kelamin perempuan yang dikenal dengan sebutan *Inong Balee*, ini tak terlepas dari semangat perjuangan yang diturunkan oleh generasi sebelumnya yang meninggalkan estapet rela membela kebenaran dan keadilan.

Namun hal ini sangat berbeda ketika relasi kekuasaan dalam kajian sosiologi yang dipaparkan oleh Foucault (1982), dimana kekuasaan tidak dipahami dalam suatu hubungan kepemilikan sebagai properti, perolehan, atau hak istimewa yang dapat digenggam oleh sekelompok kecil masyarakat dan yang dapat terancam punah. Kekuasaan juga tidak dipahami beroperasi secara negatif melalui tindakan represif, koersif, dan

menekan dari suatu institusi pemilik kekuasaan, termasuk negara. Kekuasaan bukan merupakan fungsi dominasi dari suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi atau manipulasi ideologi (Marx), juga bukan dimiliki berkat suatu kharisma (Weber).

Kekuasaan tidak dipandang secara negatif, melainkan positif dan produktif. Kekuasaan bukan merupakan institusi atau struktur, bukan kekuatan yang dimiliki, tetapi kekuasaan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut situasi strategis kompleks dalam masyarakat. Kekuasaan menurut Foucault mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan, yang mempunyai ruang lingkup strategis. Memahami kekuasaan bukan dengan mengajukan pertanyaan apa kekuasaan itu atau siapa yang memiliki kekuasaan atau dari mana kekuasaan itu bersumber, melainkan memahami kekuasaan mesti didekati dengan mengajukan

pertanyaan bagaimana kekuasaan beroperasi atau dengan cara apa kekuasaan itu dioperasikan.

Cronin (1996) menunjukkan pengertian kekuasaan sebelumnya yang memandang secara substantif tertanam dalam, dijalankan oleh, dan terhadap subjek menjadi konsep kekuasaan relasional sebagai suatu fungsi jaringan relasi antar subjek. Pergeseran ini berimplikasi pula terhadap bagaimana kekuasaan itu dioperasikan dan apa yang menjadi perhatian dalam menganalisis beroperasinya kekuasaan. Apa yang digambarkan oleh Foucault dan aliran Foucauldian ini sebenarnya menjadi sebuah pemikiran positif bagi aktor atau banyak pemikir politik yang mencoba menyalahkan pemahaman tentang relasi kekuasaan yang selalu diarahkan kepada aspek negatif bukan positif. Harusnya semua orang harus menyadari bahwa kekuasaan itu dijalankan oleh manusia bukan oleh mesin yang sifatnya digerakkan, tetapi manusia

adalah orang yang menjalankannya/menggerakkan, jadi sepatutnya setiap seseorang yang menjadi penguasa harus lebih banyak energi positif yang dikembangkan sehingga hasilnya juga berdampak positif. Kalaulah ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka yang terjadi adalah konflik. Sehingga sangat besar kemungkinan ketika sebuah negara atau sebuah komunitas/masyarakat, organisasi dijalankan tanpa dioperasikan dengan benar maka tunggulah akan terjadi benih-benih konflik, bisa saja lahirnya secara internal atau bahkan secara eksternal.

Mengamati realitas Partai Lokal di Aceh (PA, PNA, dan PDA) ini sangat jelas bahwa organisasi Partai Politik lokal yang sudah tumbuh besar dan mengakar dengan masyarakat ternyata lemah dalam menjalankan kekuasaannya. Begitu juga ketika ingin mencari kekuasaan, seperti halnya pola kekuasaan didapatkan dengan tidak

baik dari sebuah proses perjalanan Demokrasi seperti Pilkada, maka hasilnya ketika menjalankan kekuasaan akan juga sulit dan terkesan menindas lawan dalam Pilkada tersebut. perihal ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi hampir semua belahan dunia yang menjalankan roda kenegaraan melalui Demokrasi, apakah itu dalam bentuk Pemilu, Pilpres, atau pun Pilkada.

Proyeksi Isu Sara dan Potensi Konflik Sosial

Melihat kasus Pilkada Aceh 2012 dan Pilpres 2014, dalam pilkada serentak perlu diwaspadai ujaran kebencian berbasis organisasi agama, seperti Wahabi, Syi'ah dan Ahlussunnah Wajamaah, perlu menjadi kajian serius bagi institusi negara yang membidangnya, misalnya Instittusi Kesbangpong dan Limnas Aceh atau organisasi lainnya yang terkait. Inilah tantangan cukup serius yang perlu segera dikelola agar tidak menodai

pesta demokrasi lokal. Pola kebencian terhadap organisasi keagamaan akan terus menjadi strategi jitu bagi kelompok organisasi tertentu dalam menjatuhkan lawannya, hal ini dianggap mampu menekan dan menjatuhkan lawan. Ini juga yang membuat Marx membenci korporat yang berlindung dibalik ketiak pendeta Gereja dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki dalam memuluskan kerjanya, namun setelah apa yang telah didapatkan maka Gereja tidak lagi diperhatikan seperti apa yang telah dijanjikan. Sehingga terjadilah pemberontakan dari gerakan Marxian terhadap keberadaan gereja dan lahirnya kelompok atheis dan lain-lain, peranan ini juga sudah diperankan oleh elit politik dewasa ini dengan berlindung dibawah kelompok organisasi Islam seperti Organisasi Masjid, Dayah/pesantren dan OKP Islam lainnya seperti FPI (front pembela islam) Anshor dan lain-lain.

Ancaman meroketnya kekerasan dan konflik sosial dalam pilkada serentak tentunya akan terjadi tapi tidak signifikan. Secara umum masyarakat makin dewasa mengikuti Pilkada. Namun, untuk memuaskan birahi politik, sebagian kecil masih akan menggunakan cara apa pun, termasuk kekerasan. Laporan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, misalnya, "hanya" menemukan 5 persen kasus kekerasan terjadi terkait pilkada sebanyak 500 kali sepanjang 2005-2008. Pada 2010, International Crisis Group mencatat pada 220 pilkada terjadi 20 kasus kekerasan. Akan tetapi, ancaman serius berikut yang penting direspons adalah meningkatnya kekerasan non fisik. Salah satunya dalam bentuk ujaran kebencian menjelang dan saat pilkada serta setelah Pilkada. Banyak riset menunjukkan, hubungan kekerasan dan Pilkada tak selalu seperti kompor dan api. Dimana bahan baku konflik sudah

hadir sebelum Pilkada, bahkan jauh sebelumnya. Misalnya isu Wahabi, aliran sesat, stigma kafir dan lain-lain. Maka, momen politik seperti pilkada sering kali menjadi arena berbagai aktor (politisi, birokrasi, tokoh agama, tokoh masyarakat) mengangkat sentimen intoleransi keagamaan yang sudah ada itu untuk mobilisasi elektoral.

Jadi, untuk mengatasi konflik, kita harus bergerak menuju sumber masalah, tak hanya terpaku pada momen pilkada semata tetapi bagaimana kita mampu memetakan dengan baik isu yang telah ada dan memberikan upaya pemecahannya. Menarik kiranya Kesbangpolimas Aceh membuat research (penelitian) kecil dengan melibatkan institusi Perguruan Tinggi untuk memetakan konflik Sosial yang diakibatkan melalui Pilkada Aceh, dengan melihat tahapan Pra Pilkada, sedang dan setelah Pilkada kemudian penelitian ini memberikan kontribusi setiap tahapannya kepada pemerintah

Aceh dan pihak terkait terhadap Pemilihan kepala daerah (Pilkada), begitu juga saat pemilihan umum legislatif. Sehingga keberadaan Institusi Kesbangpol dan Linmas dalam bidang politik akan memberikan nuansa tersendiri dalam memberikan solusi kepada negara dan menjaga kestabilan politik dalam mewujudkan Aceh yang bebas dari konflik sosial.

Penutup

Transformasi sosial dalam kajian politik saat Pilkada menarik kiranya dilihat dengan pendekatan kekuasaan Michel Foucault dan kajian Teori Pilihan rasional Coleman, dengan melihat realitas partai politik lokal maupun partai politik nasional, masih jauh dari tujuan demokrasi yang sesungguhnya dan bahkan menggeser makna kekuasaan sesungguhnya, dimana kekuasaan bersifat produktif untuk menjawab tujuan sebuah demokrasi bukan

seperti apa yang terjadi dewasa ini, kekuasaan menjadi milik penguasa dan kelompoknya. Intinya kekuasaan tidak dipandang secara negatif, melainkan positif dan produktif. Kekuasaan bukan merupakan institusi atau struktur, bukan kekuatan yang dimiliki, tetapi kekuasaan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut situasi strategis kompleks dalam masyarakat.

Pola yang berkembang dalam upaya kampanye Pilkada hampir sebagian besar arah cara perpolitikan dalam menggalang massa dibuat berbasis kepada pola Agama dan adat, dimana para kandidat melihat arah Fanatisme yang dimiliki rakyat Aceh dari waktu ke waktu sangat terkait dengan perjuangan agama dan adat. Sehingga titik kelemahan para ustad/tengku terus menjadi strategi empuk bagi para konseptor politik dalam menjalankan aksinya, misalnya bergitu mendekati Pilkada maka masjid, Dayah/pesantren menjadi target utama yang harus

diperhatikan, apalagi aktor yang dijagokan sesuai dengan kepercayaan para lembaga institusi agama tersebut, harusnya teori pilihan rasional mejadi sebuah alternatif yang harus dilihat oleh para konseptor politik sehingga tidak terkesan mencidrai jalannya proses demokrasi. Menariknya saat pilkada 2017-2022 sangatlah unik dan menarik, dimana Partai Lokal harus bergandeng dengan partai Politik Lokal dalam menggapai Aceh 1 dan Aceh 2 (Gubernur dan wakilnya), sehingga ini peluang yang baik bagi partai nasional dalam menjalankan aksi politiknya kedepan.

Referensi:

- Abdi Mugis Mudhoffir, *Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik*, Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol. 18. No. 1. Januari 2013, Labsosio UI, Jakarta
- Cronin, Ciaran. 1996. "Bourdieu and Foucault on Power and Modernity". *Philosophy*
- Social Criticism*, Vol. 22: 55-85.
- Ikhsan Dermawan, *Bentuk Resolusi Konflik Dalam Pilkada: Kasus Pilkada Kota Yogyakarta dan Kabupaten Jepara*, *Politika* Vol.1. No.1, April 2010, MIP-Undip. Semarang
- Masrizal, 2016, *Gelombang Transformasi Sosial di Pilkada Aceh*, Kesbangpol dan Linmas Aceh, sebuah *proyeksi* Pilkada Aceh dalam kajian Pakar. Banda Aceh. Tidak diterbitkan.
- Michel Foucault. 1982, *The Subject and Power*. In *The Essential Foucault*. New York: The New Press.
- Otto Syamsuddin Ishak, 2013, *Aceh Pasca Konflik: kontestasi 3 varian Nasionalisme*, Bandar Publishing, Banda Aceh.
- Ritzer, George and Douglas J. Goodman, 2010, *Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir*, Kreasi Wacana, Yogyakarta
- TB. Massa Jafar, *Pilkada dan demokrasi konsosiasional di Aceh* Jurnal Poelitik Volume 4/No.1/2008. Jurnal Politik Unas, Jakarta.

Tim Peneliti KPU Bandung,
*Praktek Politik Uang Pada
Pemilu Legislatif 2014:
Studi Kasus di Kabupaten
Bandung Barat*, Laporan
Penelitian. Bandung